

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERBUATAN
PELAKU PEDOFILIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 292 / Pid.Sus / 2012 / PN.SGR)**

Tiara Ovitasari

Abstrak

Pedofilia merupakan suatu bentuk patologi sosial. Pedofilia menjadi ancaman yang nyata atau potensial terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan pendekatan kebijakan penegakan hukum pidana. Pengaturan tentang tindak pidana pedofilia telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun kebijakan formulasi peraturan perundang-undangan mempunyai beberapa kelemahan dikarenakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak membuat peraturan atau ketentuan yang bersifat khusus atau menyimpang dari KUHP. Kebijakan formulasi hukum pidana harus lebih optimal dan mampu untuk menjangkau perkembangan jenis kejahatan khususnya yang berkenaan dengan delik kesusilaan atau pedofilia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian normatif yuridis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan lain berdasarkan putusan. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan Hukum yang diperoleh dalam penelitian dikumpulkan melalui studi perpustakaan dengan menggunakan literatur-literatur berupa perundang-undangan, buku dan sumber internet.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Pedofilia.

JUDICIAL REVIEW OF ARBITRATION AGAINST RESPONSIBILITIES NATIONAL SHARIA ISLAMIC BANKING IN DISPUTE

Tiara Ovitasari

Abstract

Sex Abuse (Pedofilia) is a social pathology form. Pedofilia will be an actual threat or potential to social norms so that can threaten the sustainability of social orderliness. One of these is a rational attempt to approach criminal law enforcement policy. The regulation of the crime of pedophilia has been set dlaam Code of Criminal Law (Criminal Code) and Act Number 23 of 2002 on the Protection of Children. However, the formulation of policy legislation has several drawbacks because the legislation does not make rules or provisions that are specific or deviate from the Criminal Code. Penal formulation policy must be more optimal and able to reach the development of kindness crime, specially associated morality crime or pedofilia.

The research method used juridical normative, namely a study conducted and directed to the rules written and other materials based on the decision. Sources of legal materials include primary legal materials, secondary and tertiary legal materials. Legal materials obtained in the study were collected through library studies using literature in the form of legislation , books and internet sources.

Keywords : Criminal Law Policy, Pedophilia